

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERKELANJUTAN DI DESA NGIJO KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Adisty Shofia Finanda¹, Suyeno², Agus Zainal Abidin³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
Email: adistyashp@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dimulai dari temuan permasalahan mengenai tingginya prevalensi *stunting* di Desa Ngijo, yang tercatat memiliki 1.155 anak balita dengan 153 di antaranya terdeteksi mengalami *stunting*, hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah dibuat dengan implementasinya di level desa yang sebenarnya memegang peranan kunci dalam pelaksanaan intervensi, oleh karena itu, dibutuhkan kajian komprehensif untuk menelaah mekanisme pelaksanaan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya serta melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Guna memastikan validitas data, peneliti menerapkan uji kredibilitas dengan beberapa kriteria, antara lain: mengalokasikan waktu yang memadai selama pengumpulan data, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi (meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu), serta menjaga intensitas kehadiran peneliti di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berkelanjutan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 pada dasarnya, pelaksanaannya telah dilaksanakan selaras dengan ketentuan serta panduan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi *stunting* di Desa Ngijo. Oleh karena itu, ke depan para pelaksana kebijakan perlu meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan realisasi program agar upaya percepatan penurunan angka *stunting* dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi; Kebijakan; Penurunan Stunting; Stunting.*

Pendahuluan

Defisit nutrisi yang terjadi sejak awal kehidupan dapat mengakibatkan *stunting* pada bayi dan anak balita, yang selanjutnya mempengaruhi perkembangan fisik, fungsi kognitif, serta produktivitas mereka di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan kebijakan nasional, isu penanganan *stunting* ditetapkan sebagai prioritas utama baik di tingkat nasional maupun global. Walaupun angka prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan tren penurunan, tetap dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor secara terpadu.

Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan di tingkat daerah, tetapi *stunting* di Kabupaten Malang masih meningkat. Karena prevalensi *stunting* tertinggi, yaitu 153 balita dari 1.155 balita, Kecamatan Karangploso, terutama Desa Ngijo, adalah tempat yang tepat untuk penelitian ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang buruk tentang gizi, kurangnya partisipasi posyandu, dan implementasi program yang buruk. Program percepatan penurunan *stunting* telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk intervensi, termasuk penguatan posyandu, pelatihan gizi, penyediaan makanan tambahan, dan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Program ini telah bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti sumber daya yang terbatas, koordinasi lembaga yang buruk, dan perbedaan kapasitas kader.

Dengan demikian, penelitian ini sangat diperlukan guna menganalisis implementasi kebijakan, serta faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan rekomendasi yang lebih efisien untuk mempercepat penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo, Karangploso, Malang, bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat desa.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dan desa, yang hasilnya akan menjadi landasan untuk merumuskan strategi perbaikan program.
- 3.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Teori Implementasi Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur administrasi publik, khususnya terkait model implementasi kebijakan multisektoral. Penelitian ini menyajikan bukti empiris mengenai hambatan dan kesuksesan pelaksanaan program terpadu di level paling dasar, yakni desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah: Memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada Tim Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Malang terkait faktor penghambat dan pendukung yang telah ditemukan di tingkat desa.

Bagi pemerintah Desa Ngijo dan Kecamatan Karangploso: Menyediakan pemetaan mendalam mengenai pelaksanaan program di Desa Ngijo, yang meliputi komunikasi program, ketersediaan sumber daya dan sikap pelaksana (KPM dan Puskesmas).

Tinjauan Pustaka

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan jajarannya, memegang otoritas pengelolaan urusan pemerintahan lewat prinsip desentralisasi. Melalui tata kelola yang baik, mereka berupaya meningkatkan kesejahteraan warga. Daerah juga berwenang menerjemahkan kebijakan nasional, contohnya percepatan penurunan stunting, menjadi program lokal yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kumpulan tindakan serta keputusan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik. Lahir dari proses politik dan administratif yang melibatkan banyak pihak, kebijakan ini bertujuan mengatur dan mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebijakan publik berperan vital sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban sosial.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan lewat berbagai program dan kegiatan. Fase ini meliputi administrasi, koordinasi lembaga, serta interaksi antara pelaksana dan target kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, komitmen dari pelaksana, serta struktur organisasi.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III (dalam Elmore Maghfirullah, 2018), model implementasi menitikberatkan pada empat faktor kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, model Implementasi Kebijakan Top-Down dipahami sebagai proses yang diinisiasi oleh pemerintah yang kemudian diikuti oleh partisipasi masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh Maghfirullah (2018:43), Elmore menyatakan bahwa “Model Implementasi kebijakan *Bottom-Up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namaun hanya ditataran rendah”.

Problematika Stunting di Indonesia

Stunting adalah keadaan terhambatnya pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada tahap awal kehidupan hingga 1.000 hari pertama. Sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan keadaan ekonomi adalah faktor lain yang memengaruhi *stunting* selain gizi. Oleh karena itu, untuk menanganinya, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi.

Tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) merupakan indikator *stunting*, dan nilai Z harus kurang dari -2 standar deviasi. Kondisi ini menunjukkan gangguan pertumbuhan yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak.

Landasan Normatif

Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 72 Tahun 2021 untuk mengatur bagaimana arah percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dengan fokus pada kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan

masyarakat. Targetnya adalah penurunan prevalensi hingga 14%. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 ditetapkan sebagai standar operasional di tingkat lokal oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Melalui peningkatan pola asuh, sanitasi, gizi, dan peran masyarakat dalam mencegah *stunting*, kebijakan ini menekankan strategi terpadu.

Implementasi Penurunan *Stunting* di Kabupaten Malang

Program penurunan *stunting* di Kabupaten Malang dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, dan edukasi gizi, sementara intervensi sensitif mencakup peningkatan sanitasi, akses air bersih, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang rentan, yang berdampak pada keterbatasan akses pangan bergizi, Kabupaten Malang menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, untuk menurunkan prevalensi *stunting* secara berkelanjutan, program dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait data penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi berbagai informasi, kondisi, situasi, serta variabel-variabel yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Fokus Penelitian

“Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian”, Moleong 2006:92 dalam penelitian (Hidayat, 2022). Fokus ini mencakup:

1. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi program percepatan penurunan *Stunting* berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
 - a. Komunikasi kebijakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kader dalam pelaksanaan program.
 - b. Ketersediaan sumber daya (SDM, dana, sarana kesehatan) untuk mendukung intervensi penurunan *stunting*.
 - c. Komitmen pelaksana kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
 - d. Kesesuaian struktur birokrasi dan pembagian tugas pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berkelanjutan di Desa Ngijo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi program penurunan *Stunting* di tingkat Desa dengan subfokus:
 - a. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.
 1. Komitmen dan konsistensi pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa dalam menerjemahkan kebijakan pusat dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan nyata di tingkat lokal.
 2. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program.
 3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta jadwal pelayanan yang rutin sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan pemantauan pertumbuhan dan pemenuhan gizi.
 - b. Faktor penghambat program percepatan penurunan *stunting* berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.
 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan rutin posyandu.
 2. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai edukasi gizi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah metode yang diterapkan peneliti guna memperoleh informasi maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan mengejukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang dituju. Peneliti pertama kali peneliti mendatangi Kantor Kecamatan Karangploso untuk melakukan wawancara terhadap Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), selanjutnya wawancara dilakukan di Puskesmas Karangploso peneliti melakukan wawancara dengan tim koordinator gizi, di kantor Desa Ngijo dengan petugas pelaksana program *Stunting*

serta di Posyandu dan warga sekitar yang mempunyai balita dan terindikasi *Stunting* sebagai penerima manfaat program. Wawancara dengan narasumber yang sudah tertera di atas, dilakukan secara terstruktur dengan frekuensi dua kali dalam seminggu dengan durasi kurang lebih dua jam untuk setiap sesi wawancara selama masa penelitian berlangsung.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Selama di lapangan, peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan posyandu, berinteraksi antara kader kesehatan, dan ibu balita serta ikut membantu dalam kegiatan penimbangan dan pengukuran berat badan pada balita, disitulah peneliti melihat kondisi sarana, prasarana dan pelayanan yang diberikan oleh kader kesehatan kepada masyarakat. Dari pengamatan peneliti ini, terlihat adanya keterbatasan pengetahuan orangtua bayi dan balita mengenai gizi dan pola asuh yang baik.

3. Dokumentasi

Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2017), dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan mencakup: foto-foto aktivitas posyandu, dokumentasi kegiatan koordinator lintas sektor, berbagai dokumen pendukung penelitian, serta dokumentasi saat wawancara dengan informan.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan model interaktif dari Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2017), proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi sesuai indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), kemudian disajikan dalam bentuk naratif guna mempermudah pemahaman terhadap pola dan keterkaitan antar data. Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data yang telah dianalisis dan diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Desa Ngijo belum optimal, terutama karena kurangnya intensitas edukasi kepada masyarakat dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan posyandu, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat agar program berjalan lebih efektif.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, memegang peranan krusial untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2017:720), pengujian validitas data pada penelitian kualitatif meliputi empat aspek, yakni *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Uji *Credibility* dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Menyediakan Waktu yang Cukup Selama Proses Pengumpulan Data. Proses kunjungan, pengamatan dan wawancara lanjutan yang dilakukan oleh peneliti. Melalui interaksi ini, akan terjalin keakraban dan kepercayaan peneliti terhadap narasumber, sehingga semua informasi dapat disampaikan secara terbuka.
2. Meningkatkan Ketekunan Kecermatan serta Ketelitian. Dalam penelitian ini, peneliti diwajibkan untuk teliti guna melaksanakan pengecekan ulang yang menyeluruh terhadap keseluruhan hasil penelitian mulai dari data mentah hingga kesimpulan terakhir.
3. Triangulasi. Penelitian ini menerapkan metode triangulasi yang mencakup aspek sumber, teknik, dan waktu untuk menjamin akurasi data. Data yang diperoleh dari beragam narasumber dilakukan komparasi, dilakukan validasi melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi, serta pengambilan data dilakukan pada periode yang berbeda-beda guna menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Intensitas Peneliti di Lapangan. Kehadiran peneliti secara intensif di lapangan memungkinkan pengumpulan dan verifikasi data secara langsung sehingga lebih akurat. Selain itu, analisis dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

A. Komunikasi Kebijakan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kader dalam Pelaksanaan Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, kecamatan, puskesmas dan kader posyandu telah menjalin Kerjasama dalam mereapkan aspek komunikasi program percepatan penurunan *stunting* di Desa Ngijo melalui rapat koordinasi lintas sektor. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan data balita *stunting*, sasaran program, serta pelaksanaan kegiatan PMT, penimbangan dan pemantauan gizi balita. Namun demikian, komunikasi kepada Masyarakat sebagai penerima manfaat masih belum optimal. Edukasi gizi kepada orangtua balita belum dilakukan secara rutin, sehingga pemahaman Masyarakat tentang pencegahan *stunting* masih terbatas. Temuan ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menekankan pentingnya komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi melalui edukasi gizi yang lebih konsisten dan intensif agar program penurunan *stunting* dapat berjalan lebih efektif.

B. Ketersediaan Sumber Daya (SDM, Dana, Sarana).

Keberhasilan program Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Ngijo, ditunjang oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi SDM, anggaran, sarana dan prasarana kesehatan. Para pelaksana kebijakan cukup baik dalam menjalankan proses koordinasi lintas sektor, akan tetapi kader posyandu kurang rutin dalam memberikan edukasi gizi kepada masyarakat. Dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah dan desa, dimanfaatkan untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Selain itu, fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas serta alat pemantauan pertumbuhan balita juga tersedia dan mendukung pelayanan di lapangan. Namun demikian, rendahnya pengetahuan Masyarakat terkait gizi seimbang dan pencegahan *stunting* masih menjadi hambatan. Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan posyandu juga belum optimal, sehingga informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya diterima dan diterapkan. Dengan demikian, meskipun ketersediaan sumber daya sudah cukup mendukung, optimalisasi pemanfaatannya serta peningkatan edukasi kepada masyarakat tetap diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berdampak signifikan.

C. Komitmen pelaksana kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci dalam implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Ngijo. Aparat desa dan pihak kecamatan, khususnya Ketua TPPS, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program sesuai Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Komitmen tersebut tercermin dari keterlibatan pemerintah desa dalam pendataan sasaran, pelaksanaan posyandu, serta pendampingan ibu dan anak.

Selain itu, dukungan kecamatan ditunjukkan melalui koordinasi lintas sektor, kolaborasi dengan pemerintah desa dan puskesmas, serta kegiatan monitoring dan evaluasi program. Secara keseluruhan, sikap positif, komitmen, dan tanggung jawab para pelaksana telah menjadi faktor pendorong keberlangsungan dan keberhasilan implementasi program di Desa Ngijo, sejalan dengan teori Edward III mengenai pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan.

D. Kesesuaian Struktur Birokrasi dan Pembagian Tugas Pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berkelanjutan di Desa Ngijo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur organisasi birokrasi merupakan elemen krusial yang menentukan suksesnya implementasi suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan mengindikasikan bahwa tata kelola birokrasi dalam program percepatan penurunan *stunting* di Desa Ngijo sudah terorganisir dengan baik, disertai distribusi tanggung jawab yang jelas antara pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Pihak kecamatan berfungsi sebagai penerima delegasi wewenang sekaligus bertindak sebagai koordinator yang melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap jalannya program.

Sementara itu, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama melalui kegiatan posyandu, seperti pemantauan tumbuh kembang balita, penyuluhan gizi, serta koordinasi dengan puskesmas dan kecamatan. Kejelasan peran dan koordinasi antar tingkat pemerintahan tersebut mendukung kelancaran serta keberlanjutan pelaksanaan program penurunan *stunting* di Desa Ngijo.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa.

A. Faktor-faktor Pendukung dalam Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi.

Hasil penelitian mengindikasikan adanya sejumlah faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Ngijo. Pertama, program *stunting* telah dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui RKPDes dan APBDes. Ini menunjukkan bahwa *stunting* dianggap sebagai masalah strategis yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Kedua, koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, dan kader posyandu

telah berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terpadu dan efektif. Ketiga, peran aktif kader posyandu sebagai ujung tombak di tingkat masyarakat mempermudah pemantauan, edukasi, dan pendampingan kepada keluarga sasaran.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti posyandu turut mendukung akses layanan dan penyebaran informasi gizi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, keberhasilan program ditentukan oleh sinergi antara komitmen pemerintah, koordinasi lintas sektor, peran kader, ketersediaan fasilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan.

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutann Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hambatan-hambatan signifikan dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Ngijo yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya kehadiran ibu dan balita di posyandu yang hanya sekitar 50– 60%, menjadi kendala utama karena menghambat pemantauan perkembangan dan pertumbuhan anak secara berkala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahwa posyandu merupakan layanan preventif yang harus diikuti secara berkala.

Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan serta pembagian fokus dengan program kesehatan lain menyebabkan pendampingan belum optimal. Ketidakkonsistenan kehadiran juga berdampak pada tidak lengkapnya data pertumbuhan balita, sehingga menyulitkan evaluasi dan tindak lanjut program. Meskipun informasi terkait *stunting* telah disampaikan, durasi penyuluhan yang terbatas membuat pemahaman masyarakat belum menyeluruh. Dengan demikian, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta keterbatasan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan pada pelaksana kebijakan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menerapkan upaya pencegahan *stunting* di tingkat rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Ngijo sudah berjalan dengan cukup memuaskan dengan dukungan komunikasi yang baik antar pihak pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen yang kuat dari pemerintah tingkat desa dan kecamatan. Kolaborasi antar sektor yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, dan kader posyandu juga sudah terbangun dengan baik, didukung oleh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang cukup. Namun demikian, implementasi program masih menemui beberapa hambatan, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada warga masyarakat serta minimnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan *stunting*.

Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan belum optimalnya pendampingan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Ngijo. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan rutin dan terjadwal terkait pentingnya pencegahan *stunting* dan peran Posyandu sebagai sarana untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Selain itu, pemerintah desa perlu memberikan poster-poster mengenai kebutuhan gizi untuk segala umur dan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong inovasi program yang lebih menarik dan mudah diahami oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi ibu dalam kegiatan Posyandu.
2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu. Tenaga kesehatan dan kader Posyandu diharapkan bisa meningkatkan intensitas pendampingan serta kualitas penyampaian informasi terhadap masyarakat, khususnya mengenai langkah-langkah pencegahan *stunting* yang bisa diterapkan di rumah tangga. Untuk kader posyandu diharapkan lebih memahami dan meleakukan program penurunan *stunting* sesuai dengan pedoman yang ada.
3. Bagi Masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan Posyandu secara rutin serta menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi yang seimbang bagi bayi dan balita nya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkasi implementasi program percepatan penurunan *stunting* dengan pendekatan dan perspektif yang lebih meluas, seperti menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar desa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan serta faktor- faktor yang memengaruhi

keberhasilan dan kendala program.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdal, H. (2025). *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik* (O. Arifudin (ed.); Edisi Pert). Widina Media Utama.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian (1st ed.)*. SUKA-Perss UIN Sunan Kalijaga.
- Andi Cudai Nur, M. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. UM Jakarta Press, 268.
- Fitria Widiyanti Roosinda, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (1st ed.)*. Zahir Publishing.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Puataka pelajar kerjasama*.
- Guntur, A. C. N. & M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Pertama)*.
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Intrans Publishing, September, 1–121.
https://www.researchgate.net/publication/n/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Indiahono, D. (n.d.). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (Turi (ed.); Ke-2 Revi). Gava media.
- Maryuni, Lutfi, Handayani, Hastin, Trustisari, M. (2024). *Buku Pintar Cegah Stunting*.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy* (Y. Masda (ed.); Keenam Rev). PT. Elex Media Komputindo.
- Nurfadillah A. Rofia, R. N. K. (2024). *Remaja dan Stunting*. CV. TAHTA MEDIA GROUP.
- Sandjojo, E. P. (2017). *Buku Stunting Desa dalam Penanganan Stunting*.
- Subagyo, Agus. Kristian, I. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suryawati, D., Suanto, Riwayat, A., Abul Haris Suryo Negoro, S. H., Balthasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, A. A., Sulaiman, Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, I. S. U., & Seger, M. S. D. (2025). *Sistem Pemerintahan Daerah*.
- Tjilen, A. P. (2020). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi* (F. Papilaya (ed.); Digital). Nusa Media.

Jurnal

- Afdira, V. (2023). Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya. *In Jurnal Administrasi Karya Dharma* (Vol. 2, Issue September).
- Anugrah, I. K. L. S., Ilham, M., & Karno, K. (2025). Efektivitas Penanganan Stunting Di Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 52–66.[https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22191](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22191)
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67.
- Siregar, L., Damanik, I. P. N., & Luhukay, J.M. (2025). Identifikasi Peluang Dan Tantangan Penanggulangan Stunting Di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.56189/jipppm.v5i2.84>
- Kurnia Lintang Larasati, & Bambang Budi Raharjo.(2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(3), 212–219.
<https://doi.org/10.55606/detector.v2i3.4173>
- Maghfirullah, H. M. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. *Research Gate*, April, 12–40.
<https://www.researchgate.net/publication/n/326405219>
- Maghfirullah, H. M. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik.
- Mohd. Yasin*1, Siti Qomariyah1, J. (n.d.). Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN: 2685-6077 Volume 8, Nomor 1*.
- Radjulaeni, N. A. A., Masriadi, & Ahri, R. A. (2024). Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Menurut Perpres No 72 Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Indonesia. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 5(2), 224–235.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188.
<https://doi.org/10.29210/1202322804>

Skripsi

- Herlina. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai*. Universitas Medan Area.
- Hidayat, A. S. (2022). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang*

- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.*
Universitas Islam Malang.
- Maulana, I. H. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI MALANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN STUNTING (Studi pada Intervensi Gizi Spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang).* i–232. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/187939/>
- Ramadhan, S. R. (2025). *Implementasi Program “Ceting Emas” dalam Penurunan Stunting di Kota Magelang.* Universitas Tidar.

Dokumen Negara

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). [https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU_NOMOR_23_TAHUN_2014 - PEMERINTAHAN DAERAH.pdf](https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU_NOMOR_23_TAHUN_2014_-_PEMERINTAHAN_DAERAH.pdf)
- PERBUB KAB MALANG. (2018). *D:\RANANTA\produk hukum\PERBUB\2018\Perbup 33 th 2018\Perbup.doc.*
- Perpres. (2021). *Peraturan Presiden No.72. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting, 1.*

Website

- Kependudukan, D. P. P. P. A. dan. (2025). *Prevalensi Stunting Jatim Terbaik Pertama di Pulau Jawa, Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan Zero Stunting.* Dp3ak.Jatimprov.Go.Id. https://www.dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2929?utm_source
- Malang, B. K. (2025). *Kabupaten Malang Dalam Angka* (46th ed.). Badan Pusat Statistika Kaupaten Malang.
- Dinas, K. (2024). *Prevalensi Stunting di Kabupaten Malang.* KAMASUTA BERTALI Kabupaten Malang Satu Data Berbasis Teknologi Informasi.
- Kemenkes. (n.d.). *Siklus Bayi.* <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/bayi-dan-balita>
- Saputra, H. (2025). 118 Desa di Kabupaten Malang Jadi Benteng Lawan Stunting. *Malang Times.* [https://www.malangtimes.com/baca/348555/20251029/064400/118-desadi-kabupaten-malang-jadibenteng-lawan-stunting#:~:text=Melalui program PASTI %20Partner Akselerasi Penurunan Stunting di,menangani masalah yang merundung generasi masa depan ini.](https://www.malangtimes.com/baca/348555/20251029/064400/118-desadi-kabupaten-malang-jadibenteng-lawan-stunting#:~:text=Melalui%20program%20PASTI%20Partner%20Akselerasi%20Penurunan%20Stunting%20di,menangani%20masalah%20yang%20merundung%20generasi%20masa%20depan%20ini.)